

BAB I

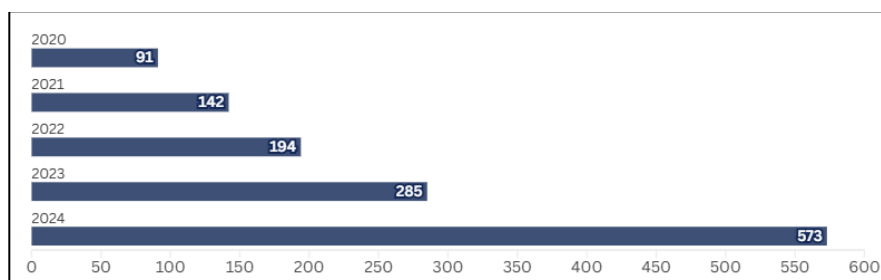
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena *bullying* di lingkungan sekolah telah berkembang menjadi isu yang semakin kompleks dan berkelanjutan, terutama pada jenjang pendidikan menengah pertama yang merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju remaja awal, di mana siswa mulai mengalami perubahan emosional, sosial, dan moral yang signifikan. Di SMPN 2 Padangan Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada kelas 7C, dinamika sosial siswa menunjukkan adanya interaksi yang tidak selalu berjalan harmonis; beberapa perilaku seperti ejekan, pengucilan, intimidasi verbal, hingga tindakan agresif mulai terlihat sebagai bagian dari pola komunikasi sehari-hari antar siswa. Kondisi ini menggambarkan bahwa siswa kelas 7C masih berada pada tahap pencarian identitas sekaligus pengujian batas-batas sosial, dan dalam proses tersebut, sebagian dari mereka memilih perilaku *bullying* sebagai cara untuk memperoleh pengakuan atau dominasi (Imanina, 2020)

Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena perilaku *bullying* tidak hanya mengganggu kenyamanan belajar, tetapi juga mampu menimbulkan trauma psikologis, menurunkan motivasi akademik, serta merusak iklim sekolah secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis sebagai ruang pembentukan karakter, pembelajaran empati, dan penguatan nilai moral melalui materi yang berkaitan dengan norma, aturan, hak dan kewajiban warga

negara, serta prinsip hidup bermasyarakat (Sari & Devra, 2024; Naiborhu & Manullang, 2022).



Gambar 1. 1 Terkait Data Kasus Bullying Di Indonesia

Jumlah kasus bullying di Indonesia menunjukkan tren yang sangat memprihatinkan dalam lima tahun terakhir, sebagaimana terlihat dari data yang tercatat antara 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah kasus bullying yang dilaporkan hanya mencapai 91 kasus, namun angka tersebut meningkat secara signifikan pada tahun berikutnya, yakni 142 kasus pada 2021 (Fadil, 2023). Peningkatan yang lebih tinggi lagi terjadi pada tahun 2022 dengan 194 kasus, diikuti dengan lonjakan pada tahun 2023 yang mencapai 285 kasus. Pada 2024, jumlah kasus *bullying* di Indonesia tercatat mencapai 573, yang menunjukkan hampir dua kali lipat dari angka tahun sebelumnya. Data ini menggambarkan bahwa masalah *bullying* tidak hanya terus berkembang, tetapi juga semakin meresahkan di kalangan siswa dan anak-anak. Peningkatan kasus *bullying* ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam upaya pencegahan dan penanganan yang efektif di sekolah-sekolah dan masyarakat secara umum. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan karakter, serta mengimplementasikan kebijakan yang lebih tegas

dalam menangani kasus *bullying* (Pratiwi et al., 2021; Usmaedi & Mualimah, 2021). Mengingat dampak jangka panjang dari *bullying* yang bisa mengganggu kesehatan mental dan perkembangan sosial anak, sangat penting untuk menemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan guna mengatasi fenomena ini agar generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan penuh penghargaan terhadap sesama (Damayanti et al., 2024).

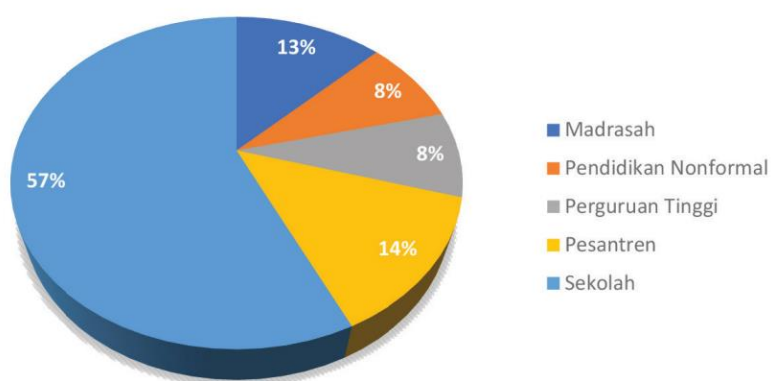
SMP Negeri 2 Padangan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Padangan dan memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan berintegritas. Sekolah ini dikenal memiliki lingkungan belajar yang cukup heterogen, baik dari sisi latar belakang sosial, karakter, maupun kemampuan akademik siswanya, sehingga dinamika interaksi antar peserta didik berlangsung sangat beragam (Fadil, 2023; Damayanti et al., 2024). Di tingkat kelas 7, khususnya kelas 7C, dinamika tersebut terlihat lebih kuat karena siswa berada pada fase adaptasi awal terhadap lingkungan sekolah baru, guru baru, serta pola pertemanan yang masih terbentuk. SMPN 2 Padangan Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran yang mendukung proses pendidikan, namun realitas sosial di kelas terkadang tidak dapat dihindari, termasuk kemunculan perilaku-perilaku negatif seperti ejekan, persaingan tidak sehat, pengucilan, hingga indikasi *bullying* yang dapat mengganggu iklim belajar (Astuti, 2023; Batubara et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sekolah telah menjalankan fungsi pendidikannya, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat aspek

pembinaan karakter dan penguatan moral siswa secara lebih sistematis (Fadil, 2023). Namun, Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah sering kali hanya dipahami sebagai mata pelajaran yang bersifat kognitif, padahal esensi utamanya adalah membentuk pribadi siswa agar tumbuh sebagai warga negara yang bermoral, beretika, menghargai keberagaman, dan mampu menyelesaikan konflik secara bijaksana (Pratiwi et al., 2021; Naiborhu & Manullang, 2022).

Penguatan nilai moral dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi penting karena nilai moral merupakan fondasi utama yang menentukan bagaimana siswa berperilaku terhadap orang lain, termasuk dalam mengontrol kecenderungan untuk melakukan *bullying*. Tanpa penguatan moral, pengetahuan siswa hanya berhenti pada konsep, bukan pada praktik nyata dalam hubungan sosial mereka (Usmaedi & Mualimah, 2021). Dalam konteks inilah pentingnya penelitian mengenai penguatan nilai moral melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi relevan, sebab SMPN 2 Padangan Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi besar untuk mengembangkan strategi pencegahan *bullying* yang lebih efektif dengan memanfaatkan pembelajaran kewarganegaraan sebagai ruang internalisasi nilai etika, empati, dan sikap saling menghargai (Yunita et al., 2021; Naldo et al., 2024). Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap karakteristik siswa di SMPN 2 Padangan Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, sekolah dapat mengoptimalkan implementasi pendidikan moral yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi benar-benar menyentuh perilaku sosial siswa, sehingga mampu

menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, harmonis, dan suportif bagi seluruh peserta didik (Sari & Devra, 2024). Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menanamkan pemahaman moral yang tidak hanya sekadar diajarkan secara teoritis, tetapi diterapkan langsung dalam situasi nyata sosial siswa. Lingkungan kelas 7C saat ini menunjukkan bahwa siswa membutuhkan pendekatan yang mampu menyentuh sisi afektif mereka, bukan hanya tingkat kognitif (Utsman, 2024).

Sebaran Persentase Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan per Provinsi (2025)



Gambar 1. 2 Data Kasus Kekerasan Akibat *Bullying* di Satuan Pendidikan

Data kasus kekerasan akibat bullying di satuan pendidikan menunjukkan bahwa fenomena perundungan masih menjadi persoalan serius di lingkungan pendidikan Indonesia. Sebagian besar kasus tersebut terjadi di lingkungan satuan pendidikan, terutama pada jenjang sekolah formal (SD, SMP, dan SMA), yang menunjukkan bahwa sekolah masih menjadi ruang dengan tingkat kekerasan akibat *bullying* tertinggi. Peningkatan kasus bullying dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengendalian emosi, rendahnya empati, pengaruh lingkungan sosial, serta kurang optimalnya upaya pencegahan dan penanganan di sekolah (Damayanti et al., 2024; Astuti, 2023). Kondisi ini

mengindikasikan bahwa bullying tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi psikologis, sosial, dan akademik bagi peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang lebih komprehensif melalui penguatan budaya sekolah yang aman, kebijakan anti-bullying, serta pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai karakter. Dalam konteks ini, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) yang diperkaya dengan penguatan nilai moral mampu membangun proses pembelajaran yang lebih humanis, reflektif, dan aplikatif, sehingga peserta didik memahami bahwa perilaku bullying bukan sekadar pelanggaran tata tertib sekolah, tetapi merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial korban (Batubara et al., 2022; Pratiwi et al., 2021; Fadil, 2023; Sari & Devra, 2024).

Urgensi ini semakin kuat mengingat bahwa guru PPKN berpotensi menjadi fasilitator utama dalam membentuk budaya kelas yang beretika, karena nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia memang melekat dalam tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Usmaedi & Mualimah, 2021; Yunita et al., 2021). Selain itu, dunia pendidikan saat ini dituntut untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang menunjukkan integritas moral, kemampuan refleksi etis, serta kepekaan sosial (Naiborhu & Manullang, 2022). Di tengah meningkatnya kasus *bullying* yang semakin tersembunyi dalam bentuk-bentuk baru seperti *cyberbullying* atau pengucilan sosial, penelitian tentang penguatan nilai moral melalui PPKN menjadi

semakin mendesak sebagai langkah preventif yang dapat memperkaya model pendidikan karakter di sekolah SMP Doko Di Blitar Jawa Timur pada tahun 2023 (Aljannah et al., 2024; Naldo et al., 2024). Adapun keterbaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya melihat *bullying* sebagai masalah kedisiplinan atau perilaku menyimpang, tetapi memandangnya sebagai gejala dari lemahnya internalisasi nilai moral dalam diri siswa. Pendekatan ini menempatkan pendidikan moral bukan sebagai tambahan pelajaran, melainkan sebagai inti dari proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Sari & Devra, 2024; Fadil, 2023). Kebaruan lainnya muncul dari penekanan pada bagaimana guru dapat mengintegrasikan penguatan nilai moral ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari melalui aktivitas reflektif, dialog moral, studi kasus, hingga pembiasaan dalam interaksi kelas (Damayanti et al., 2024; Batubara et al., 2022).

Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa PPKN bukan hanya mengajarkan konsep kewarganegaraan, tetapi dapat menjadi ruang laboratorium sosial bagi siswa untuk mempraktikkan empati, menghargai perbedaan, dan belajar menolak perilaku *bullying* secara sadar (Aljannah et al., 2024; Astuti, 2023). Selain itu, penelitian ini menghadirkan perspektif baru bahwa siswa kelas 7C memiliki karakteristik sosial tertentu yang membutuhkan pendekatan moral berbeda dibandingkan kelas lain; hal ini memperkaya pemahaman bahwa penguatan moral harus kontekstual, disesuaikan dengan kondisi sosial masing-masing kelas, bukan formula umum yang diterapkan secara seragam (Utsman, 2024). Research gap yang ingin dijawab penelitian ini muncul dari kurangnya perhatian terhadap hubungan

langsung antara pembelajaran moral dalam PPKN dengan pencegahan *bullying* di kelas.

Selama ini, berbagai upaya pencegahan *bullying* di sekolah lebih banyak berfokus pada penegakan peraturan, pemberian sanksi, atau sosialisasi umum yang sering bersifat satu arah dan tidak menyentuh akar masalah, yaitu lemahnya pemahaman siswa mengenai nilai moral dalam relasi sosial (Yunita et al., 2021; Naiborhu & Manullang, 2022). Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan dengan AN selaku guru PPKN di SMPN 2 Padangan pada hari Senin, 9 Februari 2026, terdapat perbedaan keragaman sosial yang berpotensi memicu perilaku *bullying*. Siswa di SMP Negeri 2 Padangan memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi agama maupun status sosial ekonomi. Misalnya pada perbedaan cara beribadah siswa yang menganut ajaran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya merupakan kekayaan yang harus dihargai. Namun, jika siswa belum memiliki sikap toleransi dan saling menghormati, perbedaan itu berpotensi memicu terjadinya *bullying*.

Di SMPN 2 Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, khususnya kelas 7C, belum ada pendekatan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang benar-benar terintegrasi dengan strategi penanaman moral yang diarahkan spesifik untuk mencegah perilaku *bullying*. Hal inilah yang menjadi celah sekaligus alasan perlunya penelitian ini. Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana proses penguatan moral dapat diterapkan secara sistematis dalam PPKN dan bagaimana kontribusinya terhadap perubahan perilaku siswa terkait *bullying*. Dengan demikian,

penelitian ini mengisi kekosongan pemahaman mengenai keterkaitan antara pembelajaran moral berbasis PPKN dengan pola interaksi sosial siswa, serta membuka jalan bagi sekolah untuk mengembangkan model pendidikan moral yang lebih efektif dan kontekstual.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, fokus masalah utama yang dihadapi dalam penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kasus *bullying* di SMPN 2 Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro terutama di kelas 7C, yang berpotensi mengganggu iklim pembelajaran dan perkembangan karakter siswa. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penguatan nilai moral dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMPN 2 Padangan Kelas 7C, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan nilai moral dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMPN 2 Padangan?
3. Bagaimana persepsi siswa terhadap penguatan nilai moral dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengurangi perilaku *bullying* di kelas 7C?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bagaimana penerapan nilai moral dalam implementasinya pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMPN 2 Padangan Kelas 7C, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai moral dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMPN 2 Padangan Kelas 7C, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.
3. Mengetahui persepsi siswa terhadap penguatan nilai moral dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengurangi perilaku *bullying* di kelas 7C.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori pendidikan, khususnya dalam konteks penguatan nilai moral melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter siswa, tidak hanya dari perspektif kognitif, tetapi juga dari sisi afektif dan moral. Dengan mengkaji bagaimana nilai-nilai moral diterapkan dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk mencegah perilaku *bullying*, penelitian ini berpotensi mengembangkan teori-teori pendidikan karakter yang lebih inklusif dan aplikatif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum yang lebih sensitif terhadap kebutuhan moral siswa, serta

membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang menghubungkan nilai moral dengan dinamika sosial yang ada di sekolah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi pendidik, sekolah, dan kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama dalam upaya pencegahan perilaku *bullying*. Dengan memahami bagaimana penguatan nilai moral dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat mengurangi perilaku *bullying*, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru-guru PPKN untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan berbasis pada pengembangan karakter. Selain itu, penelitian ini juga memberikan panduan bagi pihak sekolah, khususnya SMPN 2 Padang, dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari *bullying*.

E. Definisi Istilah

1. Penguatan Nilai Moral

Penguatan nilai moral merujuk pada proses mengajarkan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, yang bertujuan untuk membentuk karakter dan perilaku yang baik pada individu. Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penguatan nilai moral mencakup pengajaran mengenai empati, toleransi, kejujuran, rasa tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap

orang lain, yang diharapkan dapat membentuk siswa yang beretika dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan sesama (Fadil, 2023).

2. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN)

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mengajarkan siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai yang mendasari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks penelitian ini, PPKN tidak hanya mencakup pemahaman teori mengenai kewarganegaraan, tetapi juga penguatan karakter moral yang diharapkan dapat mencegah perilaku *bullying* dan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan harmonis (Amri & Hasibuan, 2025).

3. Bullying

Bullying adalah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap individu yang dianggap lebih lemah atau rentan, baik secara fisik, verbal, maupun sosial. *Bullying* dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk di sekolah, dan dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius bagi korban, seperti stres, kecemasan, dan penurunan harga diri. Dalam penelitian ini, *bullying* difokuskan pada perilaku yang terjadi di lingkungan sekolah, khususnya di kalangan siswa (Puspitasari et al., 2023).